PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT: PERGULATAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI ERA DESTODA

Abdul Madjid Sallatu dan Sultan Suhab

*Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan PPS Manajemen Perencanaan
Universitas Hasanuddin, Makassar*

Abstrak

The empowerment economy base on community as perspective on economy development, especially on decentralization and region authority (destoda) era for now and for the future, needs an attention from the actors of development in Indonesia. Base on that case, this research is significant to give an understanding to all the actors of development and give contribution on national development. This research also give an information how the basic strategy relevant to develop economy empowerment of the community in destoda era, especially base on public policy side on the national and regional development implementation planning policy framework.

Keywords: *the empowerment economy base on community, decentralization and region authority,, planning policy framework.*

PENDAHULUAN

Mainstream ekonomi pembangunan dalam perjalanan implementasinya di sejumlah negara maju, menekankan pentingnya *economic of scale* dalam rangka pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bila investasi menjadi sangat penting dalam strategi pembangunan. *Mainstream* ini pulalah yang diterapkan dalam menyusun dan mendesain kerangka pengembangan ekonomi pada sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia pada saat mendesain kerangka pengembangan ekonomi nasionalnya melalui formulasi kebijakan pemerintahan Orde Baru.

Pembangunan nasional diarahkan untuk melakukan proses transformasi struktur ekonomi dari pendekatan agraris ke pola industrial, yang mengharapkan nilai ekspektasi menuju ekonomi modern di dalam kerangka perumusan *grand strategy* pembangunan yang tidak lain adalah industrialisasi yang titik beratnya pada pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, strategi kebijakan pembangunan ini meletakkan sektor industri sebagai *core sector*; dan sektor pertanian (sektor perdesaan) diletakkan sebagai *supporting sector*. Suatu strategi yang sebenarnya bertolak belakang dengan hasil pengkajian yang

dipelopori oleh Cohen dan Zysman pada tahun 1989 melalui *The Berkeley Roundtable on the International Economy*, yang meletakkan sektor pertanian sebagai *core sector* dan sektor industri sebagai *supporting sector*.

Dalam perjalanan implementasi *grand strategy* tersebut, dengan keterbatasan berbagai sumberdaya pembangunan (termasuk sumberdaya sosial) yang dimiliki, Indonesia terbukti 'gagal' menciptakan struktur ekonomi yang berimbang dan tangguh secara berkelanjutan. Strategi industrialisasi yang dijalankan tersebut telah menimbulkan fenomena 'industrialisasi prematur' sebagai akibat dari berbagai masalah struktural, antara lain (sebagaimana dikemukakan oleh Simatupang, 2000):

Pertama, terjadi sindroma pertumbuhan tanpa transformasi (*growt without transformation*), *kedua*, sindroma kemunduran ketahanan pangan (*food security backwardation*) dan *ketiga*, sindroma ketergantungan ekonomi (*external economic dependency*). 'Penyakit' inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia sangat rapuh dan rentan terhadap gejala eksternal yang ditunjukkan pada terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan Tahun 1997 yang lalu.

Akibatnya, pada sisi yang lain pelaku ekonomi, dimana merupakan kelompok terbesar masyarakat yang berbasis ekonomi pertanian, oleh pemerintah Orde Baru diidentifikasi mampu menjadi *supporting sector*. Investasi didorong dan dipacu serta difasilitasi dengan bermacam skema dan kemudahan. Selanjutnya sambil menunggu *return on investment*, disiapkan kerangka kelembagaan usaha ekonomi yang kecil dan terbatas untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan ekonomi, terutama melalui wadah koperasi. Sayangnya, penghayatan lemah dan menjadi salah kaprah, sehingga koperasi justru menjadi terpinggirkan dan tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan di dalam perekonomian nasional. Hal ini terutama disebabkan oleh upaya untuk mendorong perkembangan koperasi secara fisik kuantitatif belaka, mengabaikan aspek penguatan manajemen kelembagaan dan penciptaan *value added* atau margin usaha yang terstruktur guna mendorong kemajuan ekonomi para anggotanya. Selama ini entitas kegiatan ekonomi koperasi dikategorikan sebagai ekonomi kerakyatan dalam ukuran aspek bidang-bidang usaha dan sifat kegiatan ekonomi yang dijalankannya.

Pada sisi yang lain pula, ekonomi kerakyatan/rakyat, selalu dikonotasikan dengan kehidupan ekonomi bahagian terbesar masyarakat Indonesia yang berskala kecil dan cenderung terperangkap pada kondisi yang hanya cukup untuk bertahan hidup (*subsistence level*). Oleh karena itu, senantiasa didekatkan dengan masalah-masalah kemiskinan dan ketidak-berdayan secara ekonomis. Di sektor pertanian mereka adalah petani lahan sempit/terbatas dan buruh tani. Di sektor industri pengolahan, mereka adalah pengelola industri kecil. Sedangkan sektor perdagangan dan jasa, mereka pada umumnya adalah pelaku sektor informal (PK5). Semua indikator tersebut, memberikan indikasi kepada kita bahwa sangat banyak permasalahan yang dihadapinya dan begitu kompleks permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemilahan secara sektoral di atas, sudah amat jelas bahwa tidak mudah melakukan generalisasi sejak dari perumusan masalahnya sampai kepada metode pendekatan yang digunakan untuk mengelola pengembangannya. Belum lagi untuk

memilahnya secara regional antar wilayah, dimana sejumlah faktor non-ekonomi juga ikut berpengaruh di dalamnya. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa tertutup sama sekali upaya untuk mengembangkan kerangka konseptual dalam upaya memperbaiki kondisi kehidupan ekonomi dari kalangan masyarakat yang demikian besar jumlahnya ini.

LINGKUP PERMASALAHAN

Perkembangan kehidupan ekonomi di Indonesia pada tiga dekade terakhir sering disimpulkan memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang dimaksud dapat dicermati dari berbagai dimensi. Antara lain misalnya, masa boom ekonomi dekade awal pembangunan ekonomi Orde Baru, dekade 1970-an, terbukti tidak mampu memperkuat pondasi dan struktur ekonomi nasional. Banyak faktor yang bisa dituding sebagai penyebabnya, namun kesimpulannya selalu bermuara pada kalimat sederhana, yaitu memang amat sangat kompleks permasalahan yang melekat di dalamnya. Bahkan kerangka pemikiran teoritik ilmu ekonomi pun dipandang sulit menjelaskannya.

Pada kenyataannya, sepanjang era Orde Baru yang amat fokus pada pembangunan ekonomi, kehidupan ekonomi di Indonesia terpilah-pilah dan tidak mudah atau bahkan amat sulit untuk mengaitkannya antara satu dengan yang lainnya. Dalam sektor ekonomi makro misalnya, terpilah antara sektor industri dan pertanian, terpilah antara ekspor dan impor untuk komoditas/barang dan jasa, terpilah antara penawaran arus masuk investasi di dalam negeri, terpilah antara kompetensi produksi dalam negeri dan permintaan permintaan efektif yang berkembang, dan seterusnya. Kenyataan seperti ini, secara sederhana disimpulkan bahwa kehidupan perekonomian nasional Indonesia amat luas, dan dalam banyak dimensi, terfragmentasi antara satu dengan yang lainnya. Dimana secara lebih ekstrim diidentifikasi sebagai suatu kesenjangan dan ketimpangan antar sektor, kegiatan ekonomi dan antar wilayah di Indonesia.

Dalam perkembangan lainnya akhir-akhir ini, dengan berawal dari krisis kehidupan politik negeri ini, semua pihak cenderung mencemaskan perkembangan kearah krisis fiskal. Berarti suatu

terpaan baru dan lebih dasyat akan datang lagi, dimana modusnya amat dikhawatirkan muncul dalam kenyataan yang lebih parah dan lebih kompleks. Dampak negatifnya, paling tidak, sama saja atau bahkan lebih parah dibandingkan dengan terpaan krisis moneter. Dimana tidak mustahil sektor publik akan benar-benar tersungkur (sebuah istilah dalam konotasi yang lebih menyulitkan, bila dibandingkan dengan terpuakul) dan tidak akan berdaya mengelola dan mengendalikan kehidupan ekonomi nasional.

Dari kenyataan krisis moneter sertaantisipasi pemikiran menghadapi krisis fiskal tersebut, memang amat relevan untuk berbicara dan mendiskusikan dalam artian pentingnya masalah pada ekonomi kerakyatan/rakyat ini dalam perpektif ke depan.

Hanya saja, perlu dipilah secara labih awal setiap *entry-point* yang ingin digunakan untuk mencermati dan mendekati permasalahan yang demikian kompleks. Setiap *entry-pont* tersebutlah yang diharapkan dapat mengkristalisasikan paradigma yang dapat menuntun cara pandang untuk mengelola kerangka permasalahan yang terkait di dalamnya.

PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Sebelum sampai pada menemukan jalan keluar yang relevan, diperlukan refleksi yang secara mendasar dan menyeluruh mengenai fenomena makro ekonomi yang membuat semakin terpuruknya dan termarginalisasinya kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara ekonomi, sosial dan geografis jauh dari pusat-pusat pertumbuhan. Alternatif berpikir yang dikedepankan antara lain komunitas ekonomi rakyat sebagai salah satu sel penyusun tubuh ekonomi Negara, dan merupakan sumber kekuatan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk itu pemberdayaan ekonomi rakyat perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga ekonomi rakyat (pengusaha kecil, menengah dan koperasi) dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional, terutama dengan pengalaman masa krisis yang melanda perekonomian dewasa ini.

Berdasarkan perspektif tersebut, titik berat berat pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan

terletak pada upaya mempercepat pembangunan pedesaan sebagai tempat bermukim dan berusaha sebagian besar subyek dan obyek pembangunan bangsa ini, dimana mereka berusaha sebagai petani dan nelayan yang berpolakan *subsistence level*. Pada bagian lain pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan harus mampu mengatasi dan mengurangi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pada sektor industri pengolahan serta pedagang kecil (K5) di sektor perdagangan dan jasa. Keterbatasan dan hambatan-hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumberdaya manusia (norma dan organisasi), keterbatasan akses modal dan sumber-sumber pembiayaan aktivitas ekonominya sehari-hari.

Dengan demikian, perlu dikembangkan kemampuan profesionalisme pelaku usaha pada tiga sektor usaha kecil tersebut secara berkesinambungan, agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mewujudkan peran utamanya dalam segala bidang yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini memungkinkan melalui upaya perbaikan dan pengembangan dalam pendidikan kewirausahaan dan manajemen usaha serta penataan sistem pendidikan nasional merupakan kunci utama peningkatan kualitas SDM pelaku usaha ekonomi kerakyatan pada masa mendatang, tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan dan pengalaman 'pahit' pada masa lalu.

Pada sisi yang lain, diperlukan peningkatan produktivitas dan penguasaan pasar agar mampu menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar dalam negeri. Peningkatan produktivitas dan kemampuan penguasaan pasar ini bukan hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha yang menunjang kegiatan produksi dan pemasaran. Lebih jauh dari itu, diperlukan pengembangan secara kelembagaan melalui program kemitraan usaha yang saling menguntungkan, sehingga secara kelembagaan institusi para pelaku usaha kecil, dan menengah tersebut, memiliki kemampuan dan daya saing pasar, terutama untuk mengisi pasar dalam negeri.

Di samping itu, upaya mendorong pembentukan kelembagaan swadaya ekonomi rakyat seperti kelompok pra-koperasi dan koperasi menjadi wahana meningkatkan efisiensi,

produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil, yang bukan hanya tinggal di pedesaan, tetapi juga tersebar dan termarginalisasi dalam gemerlapnya kehidupan perkotaan.

Dengan terbangunnya kemampuan kelembagaan ekonomi kerakyatan ini, diharapkan memiliki kemampuan dan kepercayaan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan yang hendaknya dapat dikreasikan melalui sumberdaya pembiayaan sektor pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat, bahkan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Karenanya, diperlukan upaya secara selektif dan transparan serta sistematis pada pengembangan sistem keuangan koperasi (atau pelaku ekonomi kerakyatan lainnya) yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan/atau lembaga-lembaga keuangan ekonomi modern lainnya, baik pada sektor pemerintah, swasta atau bahkan luar negeri.

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERENCANAAN JANGKA PANJANG

Berdasarkan perspektif sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, perlu kiranya kita mencermati sejumlah dokumen-dokumen perencanaan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional untuk 20 tahun ke depan, menempatkan pencapaian Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025: "Indonesia Maju dan Mandiri serta Aman dan Bersatu". Maju dan mandiri menempatkan pilarnya pada kemajuan dan kemandirian secara ekonomi, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pilar utama dari ekonomi kerakyatan terletak pada pengembangan UKM dan Koperasi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana RPJP Nasional memandang seperti apa perwujudan Indonesia 20 tahun ke depan dalam perspektif UKM dan koperasi.

Dalam perspektif Tahun 2025, Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan

teknologi. Pengembangan UKM menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Sedangkan koperasi diharapkan berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pada realitas kehidupan perekonomian Indonesia dewasa ini, sebagian besar pelaku ekonomi yang mengalami *ketidakberdayaan* dan *terpinggirkan*, pada sektor pertanian mereka adalah petani penggarap dan nelayan yang berpolakan *subsistence level*, pada sektor industri pengolahan mereka adalah pelaku industri kecil dan pada sektor jasa mereka adalah pekerja pada sektor informal, seperti buruh dan pedagang kaki lima (PK5).

Dalam rangka pencapaian Indonesia Maju dan Mandiri, salah satu sasaran pokoknya adalah penciptaan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis sektor pertanian sebagai penghasil produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi nasional. Kemandirian pangan nasional menjadi sasaran pokok untuk dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

RPJP Nasional secara cermat menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama aktivitas perekonomian nasional. Hal tersebut tergambar melalui upaya peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, dengan berdasarkan pada partisipasi aktif petani dan nelayan. Hal tersebut dapat dicapai melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat

operasional, optimalisasi sumberdaya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini bermanfaat di dalam menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Perhatian perlu hendaknya diberikan pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pengembangan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan secara terarah serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.

Pada sektor industri pengolahan, perhatian utama pada pengembangan pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*), terutama melalui pembangunan fondasi ekonomi lokal (mikro) guna mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas secara kolektif serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin peningkatan produktivitas, inovasi dan interaksi ekonomi melalui persaingan sehat serta nyata dalam meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan.

Sedangkan pada sektor jasa dan perdagangan, dimana sebagian masyarakat yang terpinggirkan di perkotaan bekerja sebagai buruh dan pedagang kaki lima, RPJP Nasional belum secara spesifik menyentuh masyarakat yang 'terpinggirkan' tersebut. Secara umum hanya memberikan penjelasan melalui kebijakan pengembangan ekonomi nasional agar mampu mendukung secara efektif peningkatan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian nasional, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis didalam pengembangan SDM di dalam negeri dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi nasional, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan.

Indonesia yang maju dan mandiri dalam perspektif perekonomian berbasis kerakyatan

melalui partisipasi para pelakunya Tahun 2025 yang datang, dalam sebuah perencanaan pembangunan yang terpadu dan komprehensif dengan didukung oleh kemajuan dan kemandirian dalam perspektif sektor-sektor lainnya. Visi Indonesia Maju dan Mandiri harus diterjemahkan ke dalam pengembangan visi regional (daerah otonom) dengan *supporting* dari pengembangan sektoral.

Indonesia yang maju dan mandiri dalam pengembangan visi daerah, diharapkan dalam perspektif jangka panjang akan mampu mendorong terciptanya keutuhan bangsa dan negara melalui sumbangan dan kontribusi setiap daerah melalui pembangunan sektoral yang dikembangkan dalam pencapaian visi daerah masing-masing. Hanya saja pengembangan visi daerah memiliki interdependensi dengan lingkungan strategis, terutama yang terkait dengan kemampuan setiap kepemimpinan nasional dan daerah otonom dalam menerjemahkan visi pembangunan nasional tersebut. Dengan demikian, tantangannya dewasa ini terletak pada bagaimana kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan secara teknokratik, merumuskan perencanaan pembangunannya baik dalam jangka menengah maupun dalam rencana kerja tahunan, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.

KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KERANGKA DESTODA

Patut untuk dikaji lebih jauh, bahwa betapa rapuhnya dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dibangun selama ini, sehingga gonjangan moneter mampu menjalar ke berbagai aspek dan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dimana secara ekonomi, kita juga mengalami keterpurukan aspek-aspek sosial, politik, hukum, keamanan dan bahkan aspek moralpun tidak mampu menghindar dari keterpurukan. Tentunya dalam menyikapi keterpurukan tersebut, kita tidak hanya sepihak menyalahkan strategi pendekatan pembangunan yang dijalankan selama ini, tetapi harus kita mampu menyadari, bahwa keterpurukan tersebut juga sebagian besar dari kelalaian kita dalam menjaga keseimbangan berbagai aspek pembangunan, baik secara

sektoral kegiatan ekonomi maupun secara regional (wilayah).

Karenanya disadari atau tidak, kumulatif kebijakan pembangunan masa lalu yang bercirikan *top-down*, paternalistik, sentralistik dan mekanistik serta general yang diberlakukan pada komunitas lokal yang beragam, baik secara fisik-geografis, sosial-budaya, dan ekonomi menjadi boomerang pada masa lalu. Sehingga pada kenyataannya program-program pembangunan (yang berbasis pada pembangunan ekonomi) seringkali hanya memobilisasi atau menyedot mereka yang terpinggirkan dan termarginalisasi, menempatkan manusia dan masyarakat sebagai obyek, layaknya benda mati yang harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh program pembangunan. Meskipun program tersebut tidak relevan dengan potensi dan kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat setempat (baca lokal). Program pembangunan memberikan penekanan pada indikator-indikator perubahan lahiriah, fisik, material dan artificial dan cenderung mengesampingkan indikator kesuksesan program melalui *outcomes* pembangunan yang paling tidak dapat diukur melalui daya kesediaan, mental, in-material, esensial dan martabat manusia, dimana akan memberdayakan pelaku pembangunan dalam melakukan dan mengembangkan kreativitas dan inisiatifnya

Tingkat pencapaian program-program pembangunan yang dijalankan selama ini, secara fisik mencapai kemajuan yang sangat signifikan, tetapi pada sisi justeru banyak juga menunjukkan kondisi yang paradoksal. Dimana di balik kemajuan fisik-material tersebut yang terjadi sesungguhnya adalah kemandegan, kalau tidak ingin dikatakan sebagai suatu kemunduran sosial-budaya. Mereka yang terpinggirkan dan termarginalisasi tidak mampu menjadi subyek dan hanya menjadi obyek pembangunan, dimana menjadi robot-robot pembangunan, tidak lagi memiliki prakarsa, daya cipta dan wawasan kedepan.

Kemunduran yang paling nyata pada komunitas perkotaan, yang juga telah merasuki komunitas pedesaan. Memudarnya *social capital*, dapat terlihat melalui terjadinya disorganisasi dan disintegrasi sosial yang tak memungkinkan masyarakat bekerja secara efisien dan progresif. Fenomena ini terutama dapat dilihat pada

melemahnya kemandirian (keswadayaan dan partisipasi) masyarakat, dimana pada saat yang bersamaan menguatnya ketergantungan masyarakat, terutama bagian terbesar kelompok masyarakat pada bantuan dan petunjuk dari luar, khususnya dari pemerintah atau bahkan dari donator lainnya, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Dalam perspektif yang lain, menguatnya ketergantungan bagian terbesar kelompok masyarakat tersebut, merupakan dampak dari kegiatan yang *high cost*. Hal ini nampak pada program-program pembangunan yang sering hanya berjalan seumur 'jagung', dalam artian selesai program, organisasi bubar dan selesai pertanggung-jawaban. Dalam konteks lain, banyak program pembangunan yang 'berbiaya' mahal, sebenarnya tidak perlu dikeluarkan dari anggaran biaya negara, karena sesungguhnya dapat diupayakan secara mandiri (swadaya dan partisipasi) oleh komunitas lokal. Sebaliknya, banyak potensi komunitas lokal yang bisa dikembangkan, tetapi tidak tersentuh oleh program pembangunan yang dijalankan. Sehingga potensi komunitas yang selama ini terpinggirkan dan termarginalisasi menjadi hamparan 'bungai rampi' yang tak termanfaatkan, menunjukkan kemubaziran pembangunan yang memperdayai diri sendiri sebagai bangsa. Hal ini sebagai akibat dari, terbatasnya dan lemahnya kebijakan perencanaan pembangunan yang bercirikan sentralistik, paternalistik, dan merupakan generalisasi dari kondisi dan karakteristik masyarakat dan daerah yang sebenarnya sangat beragam.

Berdasarkan perspektif tersebut, dalam kerangka perumusan kebijakan pembangunan dengan wawasan kuat dari pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, hendaknya meletakkan kerangka kebijakan yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Sehingga tidak boleh lagi ada kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat generalisasi yang memperlakukan sama antara sektor-sektor ekonomi, kegiatan ekonomi dan bahkan memperlakukan sama antara wilayah-wilayah yang ada.

Pertanyaan kemudian adalah pada level mana kebijakan tersebut diletakkan agar mampu mengakomodasi kepentingan sektor yang terpinggirkan, kegiatan yang termarginalisasi dan

wilayah yang terabaikan. Selama ini, kebijakan ekonomi yang diambil terlalu jauh jaraknya dengan kondisi riil pelaku ekonomi dari kelas ekonomi kecil, menengah. Sehingga menciptakan ketidak-seimbangan perkembangan antara sektor-sektor pedesaan (pertanian) dengan sektor-sektor perkotaan (industri dan jasa) serta lebih jauh menciptakan kesenjangan antar wilayah. Sementara pada sisi yang lain, kita harus mengakui bahwa sebenarnya selama ini sektor pedesaanlah yang banyak ‘membiayai’ sektor perkotaan. Sehingga dalam perspektif era desentralisasi dan otonomi daerah (destoda) ke depan, rumusan kebijakan perencanaan pembangunan hendaknya mampu diletakkan pada skala daerah otonom kabupaten. Tetapi dalam menyusun kerangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, rumusan kebijakan perencanaan pembangunan tersebut hendaknya bisa lebih ke bawah lagi hingga mencapai level pemerintahan kecamatan. Itupun dalam kerangka perumusan perencanaan pembangunan pada sisi kerakyatan dan oleh masyarakat itu sendiri. Dimana kerangka perencanaan masyarakat tersebut harus dapat dipayungi oleh kerangka kebijakan dari sektor pemerintah.

Dengan demikian, dalam menyikapi pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada desentralisasi dan otonomi daerah, daerah otonom harus memiliki jiwa kewirausahaan. Dalam artian, sektor pemerintah tidak lantas harus melakukan kegiatan bisnis, tetapi harus memiliki kemampuan dalam membaca kehendak dan kecenderungan pasar, terutama dalam mendorong kegiatan ekonomi kerakyatan. Sehingga, investasi sektor pemerintah bukan hanya pada kemampuan infrastruktur fisik untuk peningkatan produksi dan aksesibilitas pasar ekonomi kerakyatan, tetapi yang lebih utama dibutuhkan investasi dalam bentuk waktu dan kesabaran dari pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi kerakyatan, yang bukan hanya pada indikato-indikator fisik material, tetapi juga in-material.

Hal itu berarti, upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, diperlukan suatu langkah dalam memperbaiki kelembagaan ekonomi kecil dan menengah, dimana kegiatan ekonomi yang

selama ini terpinggirkan. Diperlukan pembentukan kembali *social capital* yang selama ini dilumpuhkan melalui kebijakan sentralistik dan general. Diperlukan langkah konkrit kelembagaan yang bekerja secara kolektif (*collective action*) melalui *social cohesion* di dalam menyusun *public policy* yang berorientasi kepentingan publik (*public interest*).

PENUTUP

Laporan bank dunia tahun 2000 menekankan bahwa tantangan pembangunan abad XXI telah tertransformasikan, dibandingkan dengan kondisinya pada dekade sebelumnya. Dimana arus globalisasi akan semakin berkembang pesat, namun pada saat yang sama sifat ke-lokal-an juga akan sangat menonjol. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembangunan pada umumnya secara cermat menghadapi era tatanan pembangunan ke depan, terutama di kalangan penentu kebijakan. Peranan pemerintah tetap penting dan strategis, tetapi tidak lagi selaku pelaku utama pembangunan, atau disebut stake-holder. Hal ini penting dipahami dalam era destoda, terutama di seputar penentu kebijakan, sifat kelokalan dan stake-holder dalam pembangunan.

Pelaku ekonomi rakyat sebagai bagian terbesar dalam masyarakat, menjadi sumber dan faktor utama dalam upaya pengembangannya. Mereka tidak bisa lagi dituntun dan diarahkan dalam arus utama (mainstream) ekonomi pembangunan ke depan. Mereka tidak boleh lagi diabaikan, baik kapasitas maupun kompetensinya.

Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan ekonomi kerakyatan terletak pada motivasi dan orientasi pelakunya sendiri, yang amat beragam dimensi kelompok kepentingan ekonomi dan sosial. Sehingga peranan nyata dari pemerintah secara langsung akan tercermin pada pemahaman dan penguasaannya terhadap permasalahan spesifik setiap kelompok usaha ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, skala dan kepentingan pemerintahan yang dapat berperan nyata disini adalah yang terdekat pada setiap kelompok usaha ekonomi kerakyatan tersebut, dalam wujud formulasi, inovasi dan implementasi kebijaksanaan yang mampu dilakukannya.

Dengan demikian, permasalahan ekonomi kerakyatan adalah permasalahan yang lebih berat bobot lokalnya. Disinilah titik temu antara pemberdayaan ekonomi kerakyatan, otonomi daerah dan juga keadilan sosial. Untuk itu, sejumlah catatan penting perlu diarahkan pada entitas kehidupan kerakyatan, antara lain: *Pertama*, kepentingan usaha kelompok melalui *economic approach*. *Kedua*, usaha bersama dalam wujud kelembagaan asosiasi melalui *institutional approach*. *Ketiga*, pelembagaan norma bersama dan diperlukan secara bersama-sama pula melalui *value approach*. *Keempat*, kesemua hal tersebut di atas, yang akan menciptakan lingkungan dunia usaha ekonomi kerakyatan yang terwujud dari kesadaran sendiri untuk berkembang, penemuan sendiri atas inti perkembangannya (secara ekonomi) dan tersedianya fasilitas untuk pengelolaan usaha secara optimal. Hal tersebut dapat dicapai melalui penciptaan ruang untuk berkembangnya aktivitas ekonomi kerakyatan, tentunya melalui perumusan kebijakan perencanaan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyagari, M., 2003, *Small and Medium Enterprises across the Globe*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Devarajan, S., 2002, *Goals for Development*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Ebel, R. and Sedar Yilmaz, 2002, *On The Measurement and Impact of Fiscal Decentralization*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Gradstein, M., 2003, *Governance and Economic Growth*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Kaufmann, D., 2003, *Governance Matter III: Governance Indicators for 1996-2002*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Murphy, D., 2000, *Membangun Organisasi Rakyat*, URM-Indonesia, Jakarta.
- Nasution, A., 2003, *Strategi Pembangunan Ekonomi Baru*, Makalah Dipresentasikan pada Kongres ISEI XV di Malang, 13-15 Juli 2003.
- Nssah, E., 2002, *Assessing the Distribution Impact of Public Policy*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Rajkumar, A., 2002, *Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter ?*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Soetrisno, N., 2003, *Kewirausahaan Dalam Pengembangan UKM di Indonesia*, Makalah Dipresentasikan pada Kongres ISEI XV di Malang, 13-15 Juli 2003.
- Sukirno, S., 1985, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LP FEUI, Jakarta.
- Tambunan, M., 2000, *Membangun Ekonomi Daerah Yang Kompetitif dan Efisien Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Memperkokoh Kesatuan Bangsa*, Prosiding Kongres ISEI XIV Makassar, Cess, Jakarta.
- Tangkilisan, H.N., 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- The Work Bank, 2003, *Kota-Kota Dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*, East Asia Urban Working Paper Series.